

ANALISIS TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008-2020

Elza Amriani dan Fitri Arianti*

Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas
Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: fitriarianti@lecturer.undip.ac.id

ABSTRACT

The economic growth of DI Yogyakarta Province tends to increase from 2008 to 2020. Meanwhile, there are still many districts or cities that are still coming in below average of DI Yogyakarta Province's economic growth. Differences in economic growth show income inequality. Income inequality between regions can lead to development problems and economic instability. This study aims to analyze the magnitude of income inequality between regions and classify the leading regions in DI Yogyakarta Province, as well as to prove the Kuznets Hypothesis. The analytical methods used are Williamson index analysis and Location Quotient (LQ). The results showed that there are still many areas in DI Yogyakarta Province that are classified as relatively underdeveloped areas (quadrant IV). The income disparity between regions in Central Java Province in 2008-2020 is high (>0.5).

Keywords: Income Inequality, Economic Growth, DI Yogyakarta, and Location Quotient.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.35002>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Todaro (2011) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan proses multidimensial yang meliputi perubahan struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan (institusi) nasional. Pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan dalam bidang ekonomi dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah dan juga masyarakat melakukan pembangunan daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah nyahal tersebut dilakukan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta dapat menciptakan lapangan kerja

baru bagi wilayah yang bersangkutan. Disisi lain pertumbuhan ekonomi yang meningkat seringkali di ikuti oleh ketimpangan pendapatan yang meningkat.

Menurut Sjafrizal (2012), faktor yang mempengaruhi ketimpangan antarwilayah yaitu 1) perbedaan sumber daya alam, 2) faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, 3) alokasi dana pembangunan antarwilayah baik investasi pemerintah maupun investasi swasta, 4) konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan 5) mobilitas barang dan jasa. Tetapi, proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan terdapat daerah yang mengalami pembangunan secara cepat sementara daerah lain memiliki laju pertumbuhan yang lambat.

Provinsi DI Yogyakarta tidak terlepas dari permasalahan dalam pembangunan ekonominya, termasuk ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota. Letak Provinsi DI Yogyakarta cukup strategis karena setidaknya bersentuhan dengan pengembangan wilayah strategis nasional yaitu Jogja-Bawen-Semarang dan Jogja-Blitar-Malang dan mengingat bahwa Provinsi DI Yogyakarta sendiri merupakan kota pelajar dan kota wisata. Dilihat dari sudut pandang ekonomi dimana hal tersebut harusnya memberikan dampak yang baik pada pembangunan di Provinsi DI Yogyakarta.

Ketimpangan yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dapat dilihat juga dari nilai PDRB perkapita tiap kabupaten/kota berikut ini:

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2008-2020 (Rupiah)

Kab/Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Kulon Progo	12.533.195	13.025.499	12.907.832	13.321.991	13.769.143	14.302.305	14.817.350	15.239.753	15.793.244	16.552.832	18.154.841	20.299.937	19.238.307
Kab. Bantul	12.901.000	13.171.1095	13.290.202	13.816.539	14.411.875	15.066.306	15.332.060	16.045.645	16.649.785	17.2937224	18.030.218	18.727.995	18.174.692
Kab. Gunung Kidul	11.878.466	12.352.915	13.100.790	13.640.174	14.250.285	14.885.054	15.225.260	15.591.561	16.190.708	16.840.005	17.542.387	18.158.766	17.817.491
Kab. Sleman	18.049.545	18.538.344	19.466.227	20.288.637	21.220.835	22.218.342	23.138.196	24.067.207	25.052.453	26.104.199	27.462.352	28.661.866	27.162.953
Kota Yogyakarta	34.333.557	35.410.825	44.440.135	46.616.062	48.701.752	50.262.263	53.207.289	54.259.256	56.345.756	58.591.320	61.119.940	63.898.904	61.569.946
Provinsi DIY	17.040.406	17.596.892	18.653.292	19.443.960	20.304.968	21.195.855	21.924.978	22.688.355	23.565.676	24.534.270	25.776.982	27.008.680	25.944.988

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Menurut Tarigan (2007), PDRB perkapita adalah total PDRB suatu daerah di bagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. PDRB perkapita adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, dimana jika semakin besar maka dapat diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Sebaliknya apabila PDRB perkapita semakin kecil maka dapat diartikan semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hanya ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki PDRB perkapita yang tinggi. Kota Yogyakarta pada tahun 2020 memiliki PDRB Perkapita tertinggi yaitu sebesar 61.569.946, sedangkan Kabupaten Gunungkidul memiliki PDRB Perkapita terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 17.817.491. Dapat dilihat dari perbedaan tingkat PDRB per kapita yang mencolok diantara kedua Kabupaten/Kota tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan regional di Provinsi DI Yogyakarta.

Salah satu usaha yang dapat dilakukan guna meningkatkan perekonomian suatu daerah adalah dengan menganalisis dan menggali sektor-sektor yang memang memiliki keunggulan. Penentuan sektor ekonomi unggulan dalam pembangunan daerah penting untuk dilakukan sebagai upaya pengalokasian sumber daya yang tersedia dengan tepat, mengingat bahwa kontribusi sektor unggulan ini terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah cukup memberikan andil yang besar. Hal ini berkaitan pada perkembangan perekonomian jangka panjang suatu daerah/wilayah strategis yang diharapkan dapat membantu dalam masalah pengentasan ketimpangan atau disparitas pendapatan khususnya di Provinsi DI Yogyakarta.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. Kemudian menentukan sektor-sektor unggulan di tiap Kabupaten/Kota agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal dan meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga menjadikan ketimpangan lebih rendah. Sehingga skripsi ini mengambil judul “Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2008-2020”.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat disparitas pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta ini, dilihat melalui PDRB dan PDRB perkapitanya. PDRB merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi daerah. Sedangkan PDRB perkapita merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk wilayah yang bersangkutan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam penelitian ini untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2008-2020 menggunakan Indeks Williamson (IW), dengan besaran nilai antara 0-1. Semakin besar IW maka semakin besar ketimpangan, sebaliknya jika IW semakin kecil (mendekati 0) maka semakin merata. Kemudian memberikan saran untuk pemerintah daerah berupa strategi dan kebijakan agar tercapainya pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari publikasi Jurnal, BPS DI Yogyakarta. Beberapa alat analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada, diantaranya, yaitu : Indeks Williamson digunakan untuk mengukur besaran ketimpangan,

Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan hubungan antara disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari

pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Berikut rumus Indeks Williamson yang dikutip dari buku Sjafrizal (2008) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \times \sum f_i / n}}{y} \quad (1)$$

keterangan:

- IW : indeks Williamson
Y_i : PDRB di kabupaten i
Y : PDRB Provinsi DI Yogyakarta
f_i : jumlah penduduk kabupaten i
n : jumlah penduduk Provinsi DI Yogyakarta

Sjafrizal (2008) dalam penelitiannya menetapkan 3 kriteria hasil perhitungan Indeks Williamson, yaitu tingkat ketimpangan rendah, sedang, atau tinggi. Berikut rentang angka kriteria ketimpangan :

- IW < 0,35 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah
- IW 0,35 – 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang
- IW > 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Rumus Location Quotient (LQ) yaitu:

$$LQ = \frac{x_i/S}{X_i/N} \quad (2)$$

di mana:

- x_i : nilai tambah sektor i di Kabupaten/Kota
S : PDRB di Kabupaten/Kota
X_i : nilai tambah sektor i di Provinsi DIY
N : PDRB Provinsi DIY

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- LQ > 1 Jika LQ lebih besar dari 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada Kabupaten/Kota lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi DIY.
- LQ < 1 Jika LQ lebih kecil dari 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada Kabupaten/Kota lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.
- LQ = 1 Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi sector tertentu pada Kabupaten/Kota sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi.

Analisis Tipologi Klassen

Untuk melihat pola dan struktur pertumbuhan ekonomi sektoral dapat dilakukan melalui pendekatan analisis Tipologi Klassen. Inti dari Tipologi Klassen adalah

dengan membedakan suatu sektor ekonomi menjadi empat klasifikasi yaitu (Sjafrizal,2008)

Table 2. Klasifikasi Tipologi Klassen

<p><u>Kuadran I</u> Daerah yang maju dan tumbuh pesat (<i>developed sector</i>) $rdi > rni$ dan $ydi > yni$</p>	<p><u>Kuadran II</u> Daerah maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>) $rdi < rni$ dan $ydi > yni$</p>
<p><u>Kuadran III</u> Daerah potensial/masih dapat berkembang (<i>developing sector</i>) $rdi > rni$ dan $ydi < yni$</p>	<p><u>Kuadran IV</u> Daerah relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>) $rdi < rni$ dan $ydi < yni$</p>

Sumber: Sjafrizal (2008)

keterangan:

rdi : laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB di Kabupaten/Kota

rni : laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB di Provinsi DIY

ydi : kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB di Kabupaten/Kota

yni : kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB di Provinsi DIY

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di Provinsi DI Yogyakarta

Besarnya disparitas pendapatan dapat dilihat dari penyebaran PDRB perkapita di Provinsi DI Yogyakarta dapat memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di Provinsi DI Yogyakarta dan mengetahui besar kecilnya disparitas tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Indeks Williamson.

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2008-2020

No	Tahun	IW
(1)	(2)	(3)
1	2008	0,8132
2	2009	0,8134
3	2010	0,8245
4	2011	0,8247
5	2012	0,8246
6	2013	0,8236
7	2014	0,8254
8	2015	0,8241
9	2016	0,8241
10	2017	0,8240
11	2018	0,8241
12	2019	0,8247
13	2020	0,8249
Rata-rata		0.8227

Sumber: Badan Pusat Statistik, Data Diolah

Tabel 3 menunjukkan angka disparitas pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta selama periode 2008-2020. Nilai Indeks Williamson tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 0,8254. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 0,8132. Dilihat dari rata-rata Indeks Williamson di Provinsi DI Yogyakarta menunjukkan angka yang semakin menjauhi nol yaitu sebesar 0,8227. Jadi, dapat disimpulkan bahwa disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta relatif tinggi atau dapat dikatakan disparitas pendapatan yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta besar dan semakin terjadi ketidakmerataan.

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang dominan atau tidak disuatu daerah. Sektor-sektor ekonomi tersebut nantinya dapat dikategorikan sebagai sektor basis dan non basis pada masing-masing kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta.

Tabel 4. Hasil analisis LQ di Provinsi DIY tahun 2008-2020

SEKTOR	DAERAH				
	Kab. Bantul	Kab. Sleman	Kab.gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
Pertanian /Agriculture	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis
Pertambangan dan Penggalian/ Mining & Quarrying	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis
Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	Sektor Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis
Listrik, Gas dan air Bersih / Electricity, Gas and Water Supply	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis
Bangunan/Construction	Sektor Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis
Perdagangan, Hotel, dan Restoran/ Trade, Hotel and Restaurant	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis
Pengangkutan dan Komunikasi/Transport and Communication	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan/ Financial,Ownership dan Bussines Services	Sektor Non Basis	Sektor Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis
Jasa-jasa/Service	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Non Basis	Sektor Basis

Dapat dilihat pada tabel 4 dimana Kota Yogyakarta memiliki enam sektor unggulan, Kabupaten Sleman memiliki empat sektor unggulan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul memiliki lima sektor unggulan, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga sektor unggulan.

Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengklasifikasikan daerah-daerah mana yang menjadi unggulan atau berpotensi untuk dikembangkan sehingga menjadi daerah unggulan yang dapat memberikan banyak kontribusi bagi daerah lain maupun bagi daerah pusat.

Tabel 5. Perkembangan Tipologi Klassen tiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2020

DAERAH	TAHUN												
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Sleman	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I
Kabupaten Bantul	IV	IV	III	IV	IV	IV	IV	III	III	IV	IV	IV	IV
Kabupaten Gunungkidul	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV
Kabupaten Kulon Progo	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	IV	III	III	III	III
Kota Yogyakarta	II	II	I	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II

Kuadran I: Kabupaten/Kota Maju dan Tumbuh Cepat

Kabupaten/kota yang sering masuk dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kuadran I ini pada umumnya daerah yang sudah maju baik dari segi pembangunan dan kecepatan pertumbuhan.

Kuadran II: Kabupaten/Kota Maju namun Tertekan

Kabupaten/kota yang sering masuk ke dalam kategori ini selama periode 2008-2020 adalah Kota Yogyakarta. Kabupaten/kota dalam klasifikasi ini adalah Kabupaten/kota yang maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang relatif kecil akibat tertekannya kegiatan utama kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kuadran III: Kabupaten/Kota Berkembang Cepat

Kabupaten yang masuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten/kota ini mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat tetapi pendapatannya masih dibawah pendapatan rata-rata Provinsi.

Kuadran IV: Kabupaten/Kota yang Relatif Tertinggal

Kabupaten /kota yang sering masuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Berdasarkan kuadran IV dimana daerah tersebut merupakan daerah yang relatif tertinggal pembangunannya dibandingkan dengan daerah yang lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis Tingkat ketimpangan menggunakan Indeks Williamson, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2008-2020 menunjukkan angka yang semakin menjauhi nol sebesar 0,822. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta semakin membesar dan semakin terjadi ketidakmerataan.

Berdasarkan tipologi Klassen, kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan perkapita menjadi empat kelompok yaitu daerah maju dan tumbuh cepat, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat tetapi tidak maju dan daerah relatif tertinggal. Tipologi Klassen dengan pendekatan wilayah ternyata menunjukkan banyak kabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 2008-2020 merupakan daerah berkembang cepat dan daerah relatif tertinggal.

Untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah, disarankan untuk mengoptimalkan sektor unggulan yang dimiliki setiap wilayah di Provinsi DIY. Untuk mencari sektor unggulan dalam penelitian ini digunakan metode LQ. Kota Yogyakarta memiliki enam sektor unggulan, Kabupaten Sleman memiliki empat sektor unggulan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul memiliki lima sektor unggulan, dan Kabupaten Kulon Progo memiliki tiga sektor unggulan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Data produk domestik regional bruto kabupaten/kota Provinsi DIY 2008-2020*.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi pembangunan: Proses, masalah, dan dasar kebijaksanaan*. Kencana.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi regional: Teori dan aplikasi*. Baduose Media.
- Tarigan, R. (2004). *Ekonomi regional*. Bumi Aksara.
- Tarigan, R. (2007). *Ekonomi regional teori dan aplikasi edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Penerbit Erlangga.